

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan dasar Negara dan juga sebagai ideologi bangsa. Menurut Pandji Setijo (2006: 81), sebagai suatu paradigma, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang meliputi segenap bidang kehidupan. Di antaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum dan hak asasi manusia.

Selain Pancasila yang merupakan dasar Negara dan sebagai ideologi bangsa, Undang Undang Dasar 1945 juga merupakan dasar Negara sebagai landasan Konstitusi bagi bangsa Indonesia, dan merupakan dasar yang menjadi sebuah pedoman pokok di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara.

Dalam paradigma pembangunan nasional di bidang ekonomi, sifat perekonomian disesuaikan dengan ekonomi kerakyatan yang bersumber kepada sifat kekeluargaan dan kerakyatan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua. Dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk melindungi kepentingan rakyat yang sesungguhnya, perlu pihak pemerintah mengendalikan perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan digunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya secara keseluruhan. Seperti yang tercantum dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat (1) Tentang

sistem perekonomian di Indonesia bahwa: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dari hal di atas tercantum jelas bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Badan Usaha yang sesuai dengan itu adalah Koperasi.

Koperasi merupakan salah satu dari tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian Indonesia yang saling berkaitan yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi serta peran masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pembangunan perekonomian di Indonesia tentunya. Koperasi berperan nyata sebagai gerakan ekonomi rakyat dan perlu didorong pengembangannya dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi yang mandiri yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat. Dijelaskan pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 pasal 3 tentang Perkoperasian mengatakan bahwa tujuan Koperasi:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, pembangunan kehidupan berkoperasi diharapkan sebagai sarana bagi perluasan dan pengembangan sumber daya manusia ke arah tingkat hidup dan pola organisasi yang maju yang membuat terbukanya kesempatan kerja yang luas dan berbagai biaya dapat dihemat pula (Pandji Anogara 2007:147). Dalam pengembangannya diharapkan keikutsertaan pemerintah untuk membina dan mengarahkan serta memberikan fasilitas yang diperlukan Koperasi dalam usahanya untuk mewujudkan suatu Koperasi yang benar-benar mandiri supaya dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya. Salah satunya yaitu jenis Koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama atau yang disebut Koperasi Produksi. Alfred Hanel (2005: 61) mengemukakan bahwa: “pada Koperasi Produksi anggota adalah pekerja atau karyawan, sekaligus pengusaha atau majikan dari perusahaan Koperasi yang dimilikinya secara bersama.” Konsepsi mengenai usaha bersama atau dalam arti khusus Koperasi tidak saja meliputi kegiatan produksi bersama, melainkan kadang-kadang mencakup pula kegiatan konsumsi bersama. Kegiatan utama Koperasi produksi adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama Koperasi produksi adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang merupakan jenis Koperasi Produksi. Koperasi ini didirikan pada tanggal 29 Juli 1974. Koperasi yang berkedudukan di Jalan Raya Cibodas RT.03 RW.7 Desa Cibodas, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut dan memperoleh Badan Hukum Nomor : 518/KEP.001/PAD/BH/DISKOPPAS/VI/2007 yang disahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, di mana badan hukum tersebut merupakan perlindungan hukum bagi Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang.

Dalam melaksanakan semua kegiatan organisasi dan usahanya, Koperasi ini merupakan salah satu jenis Koperasi multi usaha (*Multi Purpose*) karena berkiprah pada lebih dari satu lingkup usaha. Adapun unit usaha yang dijalankan KPGS untuk memenuhi kebutuhan anggotanya adalah:

- a. Usaha Sapi Perah/Susu Segar
- b. Usaha Pakan Ternak
- c. Usaha Simpan Pinjam
- d. Minimarket KPGSmart

Dalam menjalankan usahanya Koperasi diarahkan pada usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Koperasi harus dikelola secara produktif, efektif, dan efisien agar mampu berperan aktif dalam dunia usaha yang semakin keras persaingannya. Dalam hal ini Koperasi harus memperhatikan bahwa manajemen dalam Koperasi sangat penting. Salah satunya yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan

Koperasi berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dana dan penggunaan dana tersebut secara efektif dan efisien.

Salah satu cara untuk memaksimalkan fungsi manajemen dalam mencapai tujuan adalah dengan menggunakan aset yang dimiliki Koperasi, manajemen harus dapat mengelola aset yang dimiliki untuk kelangsungan usaha Koperasi. “Aktiva merupakan bentuk dari penanaman modal perusahaan. Bentuknya dapat berupa harta kekayaan atau hak atas kekayaan atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan” (Jumingan 2014: 13). Harta kekayaan tersebut harus dinyatakan dengan jelas, diukur dalam satuan uang, dan diurutkan berdasarkan lamanya waktu atau kecepatannya berubah kembali menjadi kas. Selain itu aset juga merupakan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang.

Untuk mengukur efektivitas organisasi dan usaha, ada beberapa rasio yang dapat digunakan, Salah satunya rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu rasio aktivitas. Menurut Kasmir (2011: 172), rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Dari hasil pengukuran ini, akan diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan sehingga manajemen dapat mengukur kinerja mereka selama ini serta mampu mengoptimalkan laba dari penggunaan aset yang dimiliki.

Jika penggunaan aset pada Koperasi tidak efektif maka hal tersebut bisa berdampak terhadap laba yang diperoleh Koperasi. Meskipun pada hakekatnya

koperasi bukan badan usaha yang dibentuk atas dasar perkumpulan modal dan bukan usaha yang berorientasi pada laba, akan tetapi laba atau sisa hasil usaha secara tidak langsung juga menjadi indikator keberhasilan Koperasi dalam mengelola kegiatan usaha yang dijalankannya. Oleh sebab itu sudah menjadi tugas pengurus dan pihak manajemen Koperasi untuk mengelola semua harta yang dimiliki Koperasi seefisien mungkin sehingga dapat memaksimalkan sisa hasil usaha dan pada gilirannya akan dapat memaksimalkan kesejahteraan anggota.

Menurut M. Amin Aziz (1985) dalam Rully Indarawan (2013: 50) mengatakan bahwa, “salah satu penyebab anggota bersedia untuk berpartisipasi adalah keadaan manajemen”. Bila program kerja yang dibuat dan seharusnya dijalankan oleh pihak manajemen, tetapi jika dalam kenyataannya pihak manajemen tidak mampu menjalankan maka pihak manajemen tidak lagi dapat dipercaya oleh anggota, dan anggota dapat memutuskan untuk tidak melakukan partisipasi. Oleh sebab itu manajemen Koperasi harus menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan program kerja yang telah dibuat. Jika koperasi telah mampu menjalankan program kerjanya maka diharapkan partisipasi anggota juga akan meningkat, dan dengan meningkatnya partisipasi anggota juga diharapkan akan meningkatkan pendapatan Koperasi dan juga meningkatkan laba atau sisa hasil usaha yang pada akhirnya juga meningkatkan manfaat ekonomi bagi anggota.

Menurut Bambang Riyanto (2008: 36), rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal di dalam suatu perusahaan, dan dimaksudkan sebagai kemampuan perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba. Efisiensi baru dapat diketahui dengan

membandingkan laba yang diperoleh itu dengan kekayaan yang menghasilkan laba tersebut atau dengan kata lain menghitung rentabilitasnya. Hal tersebut juga dapat diterapkan di Koperasi. Tingkat efisiensi penggunaan modal usaha yang dimiliki Koperasi juga bisa dilihat dari perhitungan Rentabilitas Ekonomi atau *Return On Asset (ROA)*. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan Koperasi dengan seluruh sumber daya atau aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar tingkat ROA maka akan semakin tinggi tingkat efisisensinya.

Perhitungan ROA untuk melihat tingkat efisiensi pada Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan *Return On Assets* pada Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Tahun 2013 sampai Tahun 2017

Tahun	SHU Setelah Pajak (Rp)	N/T SHU (%)	Total Aset (Rp)	N/T Aset (%)	ROA (%)	N/T ROA (%)
2013	248,963,346.68	-	20,650,856,318.82	-	1.21	-
2014	249,747,591.83	0.32	23,914,296,648.25	15.80	1.04	(0.14)
2015	251,324,113.70	0.63	23,605,825,877.13	(1.29)	1.06	0.02
2016	253,215,506.83	0.75	23,785,951,773.75	0.76	1.06	0.00
2017	258,709,272.50	2.17	24,093,975,569.64	1.29	1.07	0.01

Sumber : Laporan Keuangan KPGS Cikajang tahun 2013-2017

Dari tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa sisa hasil usaha setelah pajak pada KPGS setiap tahunnya mengalami peningkatan. Begitu pula dengan total aset yang dimiliki juga cenderung meningkat meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan. *Return On Asset (ROA)* pada KPGS pada tahun 2014 juga mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun selanjutnya meningkat dari tahun sebelumnya meskipun peningkatannya relatif kecil. Berdasarkan Kategori pengukuran *Return On Asset* pada Koperasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 06/Per./M.KUKM/V/2006 Tentang Pedoman Penilaian Kerja Koperasi Berprestasi/Koperasi Award, menunjukkan bahwa kemampuan KPGS dalam menghasilkan SHU dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki masih sangat rendah. Karena nilai *Return On Assets* KPGS pada tahun 2013 hingga 2017 hanya antara 1% -< 3%, sehingga KPGS berada pada kategori kurang baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan total aset yang dimiliki KPGS untuk menghasilkan laba (sisa hasil usaha) masih belum optimal.

Dengan keadaan di mana nilai *return on asset* berada pada kategori kurang baik menunjukkan bahwa Koperasi masih belum mampu menggunakan aset yang dimiliki secara efektif untuk menghasilkan laba atau sisa hasil usaha. Diduga hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang belum efektif pelaksanaannya seperti penjualan, persediaan, penagihan piutang serta yang lainnya yang merupakan bagian dari seluruh aset yang dimiliki Koperasi. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis untuk mengetahui terjadinya ketidakefektifan penggunaan aset pada KPGS yang menyebabkan tingkat *Return On Asset* menurun dan berada pada kategori kurang baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizanul Akbar Asofi pada tahun 2016, menyatakan bahwa hasil perhitungan koefisien korelasi dari efektivitas penggunaan aset (X) dengan menggunakan rasio aktivitas memiliki hubungan yang sangat erat terhadap *Return On Assets* (Y) karena setiap bagian perhitungan rasio aktivitasnya mendekati satu dan hasil yang diperoleh bernilai positif yang artinya bahwa memiliki hubungan yang searah. Di mana jika terjadi

peningkatan efektivitas penggunaan aset, maka terjadi peningkatan *Return On Assets* (ROA). Sebaliknya, jika terjadi penurunan tingkat efektivitas penggunaan aset, maka akan berdampak pada penurunan ROA.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Efektivitas Penggunaan Aset Terhadap Efisiensi Penggunaan Aset”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan judul penelitian yang telah dikemukakan dan untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka permasalahan yang terjadi diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sejauhmana tingkat efektivitas penggunaan aset pada Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan aset pada Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang.
3. Bagaimana pengaruh efektivitas penggunaan aset terhadap efisiensi penggunaan aset pada Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang.
4. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan aset di Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk (digunakan dalam memecahkan dan memberikan jawaban atas masalah yang telah diidentifikasi) mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui:

1. Sejauhmana tingkat efektivitas penggunaan aset pada Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan aset pada Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang.
3. Bagaimana pengaruh efektivitas penggunaan aset terhadap efisiensi penggunaan aset pada Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang.
4. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan aset di Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Aspek guna laksana

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen KPGS dalam melakukan penggunaan aset secara efektif dan efisien serta dalam upaya meningkatkan SHU yang diperoleh Koperasi.

2. Aspek pengembangan ilmu

- a. Bagi penulis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan baik secara teori maupun secara aplikasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti khususnya yang sesuai dengan jurusan keuangan. Serta sebagai aplikasi dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah sekaligus acuan untuk menilai sejauhmana kemampuan dalam meneliti, menelaah

serta menganalisis suatu masalah dan bagaimana caranya untuk memecahkan masalah tersebut dengan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi peneliti lain

Sebagai sarana yang dapat menambah informasi mengenai masalah yang diteliti serta sebagai referensi, acuan dan pembanding untuk melakukan penelitian yang sejenis.

1.5 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang, Garut Selatan, yang beralamat di Jalan Raya Cibodas RT.03 RW.7 Desa Cibodas, Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut 44171. Badan Hukum No: 518/KEP.001/PAD//BH/DISKOPPAS/VI/2007 tanggal 05 Juni 2007.



IKOPIN

BAB II

PENDEKATAN MASALAH DAN METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, diperlukan adanya pendekatan masalah yang nantinya dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemecahan yang mungkin timbul atau terjadi. Pendekatan masalah menggunakan konsep, teori, prinsip, dan teknik yang relevan sebagai berikut:

2.1.1 Pendekatan PerKoperasian

Koperasi merupakan lembaga perekonomian rakyat yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan merupakan salah satu lembaga ekonomi rakyat yang berujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian jati diri koperasi terdiri dari pengertian Koperasi, nilai-nilai Koperasi dan prinsip-prinsip Koperasi.

a. Pengertian Koperasi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 dinyatakan bahwa :

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan."